

Keabsahan perbuatan hukum yang terkena sanksi degradasi kekuatan bukti otentik menjadi akta dibawah tangan : studi kasus terhadap Putusan PT Bandung Nomor 239/PDT/2010/PT.BDG = The validity of legal acts sanctioned with strength degradation of an authentic evidence into illegal certificate study case on the High Court Bandung ruling Number 239/PDT/2010/PT.BDG

Hendry Zamora, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403597&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang dapat dikenakan sanksi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik baik yang dibuat dalam minuta akta atau akta in originali, dalam bentuk akta partij atau akta pejabat memuat perbuatan hukum para pihak. Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan sepanjang ada pelanggaran terhadap ketentuan otentisitas yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perbuatan hukum yang disebut dalam akta tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan akta itu ditandatangani oleh semua pihak yang disebut dalam akta. Hilangnya otentisitas suatu akta otentik mempunyai implikasi kebatalan yang bervariasi terhadap perbuatan hukumnya. Jika akta otentik kehilangan otentisitas, perbuatan hukumnya menjadi non eksisten jika aktanya mempunyai fungsi sebagai formalitas kausa, jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, maka perbuatan hukumnya tetap sah sepanjang ditandatangani oleh semua pihak, dan jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, tapi ada surrogat tanda tangan atau para pihak tidak menandatangani akta pada akta pejabat, maka aktanya menjadi non eksisten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi kasus terhadap putusan pengadilan secara keliru telah menafsirkan degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan tanpa mengkaji implikasi terhadap perbuatan hukumnya.

<hr>Civil Law Notary regulates that the violations of certain paragraphs could be sanctioned with authentic strength degradation of an evidence into illegal certificate. Notarial deeds as an authentic certificate, either made in the form of minuta or in originali, partij or official deeds, carry certain legal actions for the parties concerned. Strength degradation of an authentic evidence into illegal certificate may be given, as long as there are violations to the authenticity provisions regulated in the Civil Law Notary, and the legal acts mentioned in the certificate do not need to be written in the form of authentic certificate and signed by all parties concerned. The loss of authenticity of a certificate implies various nullifications of its legal acts. If an authentic certificate loss its authenticity, its legal acts become nonexistent if the certificate has the function as a formality causa. If the legal acts do not need to be expressed in the authentic certificate, the legal acts are still valid as long as it is signed by all parties concerned. And if the legal acts do not need to be written in the form of an authentic certificate, but there exists a surrogate signing or the parties concerned do not sign the official deeds, the certificate becomes nonexistent. This research is conducted using the normative juridical method from secondary sources. The instrument of data collection is documents studies. The study case on the High Court Ruling mistakenly interprets the strength degradation of an authentic evidence into illegal certificate without reviewing the implications on its legal actions.